

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KOMPERATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI KELANTAN DAN
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI TERENGGANU
MENGENAI KHALWAT**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**ALIA SYAKIRAH BINTI MAT
11523105701**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU – PEKANBARU
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *(STUDI KOMPERATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI KELANTAN DAB MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI TERENGGANU MENGENAI KHALWAT)*, yang ditulis oleh :

Nama : Alia Syakirah Binti Mat

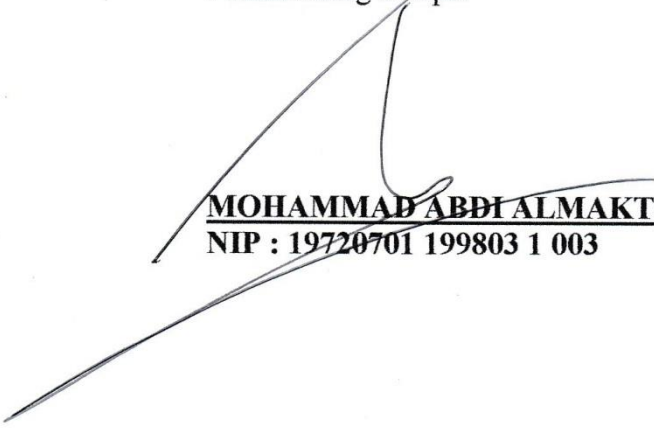
NIM : 11523105701

Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqashah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Zulkaedah 1440 H
20 Juli 2019 M

Pembimbing Skripsi


MOHAMMAD ABDI ALMAKTSUR, MA
NIP : 19720701 199803 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul (*STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI KELANTAN DAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI TERENGGANU MENGENAI KHALWAT*) yang ditulis oleh :

Nama : **Alia Syakirah Binti Mat**
NIM : 11523105701
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 September 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Haji Heri Sunandar MCL

Sekretaris

Mutasir, S.Hi, M.Ag

Penguji I

Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag.

Penguji II

Dr. Haji Suhayyib, MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alia Syakirah (2019) Binti Mat : Studi Komperatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan Dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu Mengenai Khalwat.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu tentang putusan hakim dalam kasus khalwat. Untuk setiap putusan mahkamah yaitu Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan menerapkan ketetapan berdasarkan enakmen negeri bahwa bagi pelaku khalwat yang disabitkan dengan kesalahan khalwat akan didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya, manakala untuk Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu pula, jika disabitkan melakukan kesalahan khalwat, enakmennya adalah di denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dalam menetapkan hukum khalwat, putusan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu Dalam Menetapkan Hukuman Khalwat dan Faktor penyebab Perbedaan Putusan Hakim. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan komperatif dengan membuat perbedaan putusan antara Negeri Kelantan dengan Negeri Terengganu.

Kajian ini penulis fokuskan kepada faktor serta pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan dalam kasus khalwat berdasarkan beberapa kasus yang diberikan kepada penulis. Jumlah semua kasus dari Negeri Kelantan sebanyak 10 kasus dan dari Negeri Terengganu pula sebanyak 10 kasus dan keseluruhannya berjumlah 20 kasus sebagai jumlah sampel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor serta pertimbangan dari kedua-dua mahkamah negeri sebelum putusan dikeluarkan.

Hasil analisis menunjukkan putusan dari pertimbangan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan menjadikan watak dan perlakuan pelaku dan masa membuat rayuan mayoritasnya sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan dikeluarkan bagi pelaku khalwat manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu pula menjadikan waktu tangkapan, situasi tangkapan dan status tersangka mayoritas sebagai pertimbangan sebelum putusan dikeluarkan.

Berdasarkan statistik yang ditunjukkan kepada penulis, dapat penulis melihat tingkat menurun serta menaik jumlah kasus khalwat ini. Untuk Negeri Kelantan, statistik yang dilihat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 semakin menurun manakala untuk Negeri Terengganu semakin meningkat. Antara faktor yang diberitahu kepada penulis oleh hakim untuk Negeri Kelantan mengenai menurunnya statistik kasus khalwat ini adalah karena negeri Kelantan amat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil serius tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan kerajaan memperketatkan lagi undang-undang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Manakala untuk Negeri Terengganu pula, faktor yang menyebabkan semakin meningkat kasus khalwat adalah dikarenakan di Negeri Terengganu terdapat banyak tempat-tempat wisata yang kebiasaannya akan mengundang anak-anak muda laki-laki maupun perempuan untuk berkumpul di tempat tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap perkara ini adalah sesuai dengan hukum Islam karena putusan ini dilakukan dengan seadil-adilnya dengan musyawarah pemerintah dan mematuhi kehendak-kehendak hukum syarak agar perkara ini dapat dibendung dari terus berleluasa dan akan merusak anak-anak serta pemuda-pemudi harapan agama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul ***“Studi Komperatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan Dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu Mengenai Khalwat”*** Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moril, materil, serta do'a. Ibunda tersayang **Kamariah Binti Daud** dan juga kepada adik, Anas Syukri, yang selalu membuatku tetap semangat dan berdiri kokoh.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag., selaku dekan fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag sebagai ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan hukum.
5. Bapak Abdi Al-Maktsur, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Terima kasih kepada kepada Bapak Hendri Sayuti, MA. Dan Bapak Ibu dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas Ilmu yang telah diberikan.
9. Terimah kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: Syiffaq Ayumiey, Nurul Husna, Siti Norizzatie, Sobirin, Fahrurrozi, Rahmad Ridwan, Zafirah, serta semua kawan-kawan keluarga besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2015, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi, yang nantinya kita akan sama-sama saling merindukan satu sama lain. Serta seluruh Adek-adek dan Rekan-rekan HMJ PMH dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekalilagi terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon ma'af dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran, masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 19 Maret 2019

Penulis,

ALIA SYAKIRAH BINTI MAT
NIM : 11523105701

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM NEGERI PENELITIAN	
A. Sejarah Negeri Kelantan	14
1. Latar Belakang	14
2. Sejarah Berdiri	15
3. Tujuan	17
4. Visi	18
5. Misi	18
6. Struktur Dan Organisasi	18
B. Sejarah Negeri Terengganu.....	20
1. Latar Belakang	20
2. Sejarah Berdiri	21
3. Tujuan	24
4. Visi	25
5. Misi	25
6. Struktur Dan Organisasi	26
BAB III KHALWAT	
A. Definisi Khalwat	28
1. Maksud Pergaulan.....	30
2. Dasar Hukum Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pandangan Ulama Tentang Permasalahan Berkaitan Khalwat	33
B. Sejarah Penumbuhan Enakmen Islam.....	36
1. Kelantan	36
2. Terengganu.....	41

BAB IV PUTUSAN KHALWAT

A. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dalam Menetapkan Hukum Khalwat	48
B. Putusan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu dalam Menetapkan Hukum Khalwat	59
C. Faktor Penyebab Perbedaan Putusan Hakim.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kelakuan tidak baik atau bisa diistilahkan sebagai perbuatan tidak sopan ini banyak terjadi pada masa sekarang contohnya berhubungan rapat dengan laki-laki dan wanita tanpa hubungan mahram, berkelakuan tidak senonoh, berpakaian tidak sopan di tempat awam dan lain-lain. Para pelaku ini banyak tergolong di kalangan remaja Islam yang bisa membawa kearah kemaksiatan. Hal ini banyak terjadi di tempat-tempat awam dan terlihat jauh dari pandangan orang ramai. Ini mungkin disebabkan karena pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita bukan muhrim tanpa batas. Banyak kesan dari pergaulan bebas, antaranya keruntuhan akhlak, wujudnya anak yang tidak saf taraf dan lain-lain¹.

Golongan ini juga seharusnya menjaga mata atau pandangan karna mata kuncinya hati. Dan pandangan itu menjadikan fitnah yang sering membawa kepada perbuatan zina. Oleh karena itu firman Allah SWT, Surat An-Nur Ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakan pada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Darjat Wanita Dalam Islam*, Pustaka Ilmi, h, 66-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksudkan menundukkan pandangan yaitu menjaga pandangan, tidak melepaskan pandangan begitu saja apalagi memandangi lawan jenis penuh dengan hawa nafsu. Dan secara umum kehidupan seorang muslim dan muslimah yang berpegang teguh kepada agamanya adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar ibadah kepada Allah, menjaga kesucian diri, menjaga kemuliaan dan menjaga rasa malu.

Namun sangatlah disayangkan bahwa prinsip kehidupan tersebut banyak dilupakan atau tidak disadari oleh banyak perempuan muslimah saat ini. Corak pergaulan dan pakaian banyak perempuan saat ini adalah bentuk dari gaya jahiliyah yang dicontoh dari negara kafir sehingga banyak dari perempuan sama sekali tidak menunjukkan ciri seorang perempuan muslimah yang penuh adab dan akhlak yang mulia dengan pakaian yang sesuai syari'at dan menggambarkan rasa malu serta menjaga aurat sebagai hiasan perempuan shalihah yang merupakan dambaan setiap insan.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamين senantiasa menginginkan keselamatan, kebahagiaan bagi seseorang, maka islam menetapkan hal-hal yang harus diwujudkan seperti pemeliharaan agama, pemeliharaan keturunan dan lain-lain sebagainya. Dengan menjaga keturunan inilah Islam menganjurkan pernikahan, maka Islam melarang orang untuk berkhawat atau berzina.

Khalwat menurut tata bahasa Arab, diambil dari kata خلا يخلو² artinya “berkhawat, mengasingkan diri²”.

² Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, h,111-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayip Syafruddin mendefinisikan tentang khalwat ialah:

“Apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan mahramnya, berada di suatu tempat hanya berdua saja. Dan biasanya memilih tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain”. khalwat dalam agama Islam adalah dilarang. Hal ini dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW: “dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena yang sesungguhnya yang ketiganya adalah setan”. (HR.Ahmad). Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan³ (Pasal 1 angka 16 QHJA)⁴

Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan hukuman bagi setiap kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan-kesalahan merupakan perbuatan dosa besar atau dosa kecil bagi pelaku kesalahan tersebut. Hal ini dimaksudkannya untuk memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, dan menjamin kemaslahatan umat. Sebagai contoh dari kesalahan yang menyebabkan pelaku dikenakan hukuman adalah zina.

Khalwat adalah hal yang diharamkan oleh agama ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis. Di antara hadis Rasulullah itu adalah sebagai berikut :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan⁵.”(HR.Ahmad,

³ Neng Djubaedah, S.H.,M.H., *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, h, 104.

⁴ Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H.,M.A, *Peradilan Islam*, Amzah, h, 374.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, h, 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi)

Apabila adanya khalwat, maka khalwat akan mendorong manusia untuk mendekati zina⁶. Di dalam Al-Quran zina dinyatakan sebagai perbuatan keji dalam firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan)*

Dalil di atas jelas menggambarkan Islam mengharamkan zina dan apa saja yang dapat membawa kita kepada perbuatan zina adalah haram. Justeru itu, apa saja yang membangkitkan seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki ataupun perempuan, serta mendorong orang untuk berbuat hal keji. Islam melarang untuk melakukan hal yang diharamkan karena dapat membawa kepada perbuatan yang merusak⁷.

Di dalam hadis yang lain pula, diriwayatkan dari Abu Umamah dari Rasulullah SAW yang bersabda: “Takutlah kalian terhadap berkhawat dengan perempuan. Sungguh, demi Dzat yang menggenggam nyawaku, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan akan menggoda keduanya. Sekiranya seseorang berkumpul dengan babi yang bergelepotan lumpur, hal ini akan lebih baik baginya daripada pundaknya mensejajari pundak seorang perempuan yang tidak halal baginya”,

⁶ Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al-Jarullah, *Hak Dan Kewajiban Wanita Menurut Islam*, Al-Hidayah Publishers, h, 39.

⁷ Nurul Amira Binti Mohd Nasir, *Hukuman Bagi Penzina Dalam Enakmen Kanun Syariah Tahun 1985 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah*, Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(HR.Ath-Thabrani).⁸ Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya”.⁹(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Perbuatan tidak baik ini adalah satu kesalahan dan bersalah di bawah Enakmen Jenayah Syariah Malaysia. Perbuatan ini juga adalah di larang dalam Islam dan Undang-Undang Jenayah Syariah Malaysia. Perbuatan ini merangkum dalam hukuman Takzir. Ulama sepakat menetapkan, bahwa ta’zir disyariatkan pada semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had, hukuman yang sudah ditentukan jenisnya. Hukuman ta’zir diterapkan pada dua macam perilaku kejahatan, yaitu kejahatan yang meninggalkan kewajiban, atau kejahatan yang melanggar larangan¹⁰. Oleh itu Islam telah memberikan batasan-batasan antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan suami istri.

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan tahun 1985 di dalam Seksyen 9 (1) yaitu¹¹:

“Seseorang laki-laki yang didapati bersekediaman atau bersekedudukan atau berkurung atau bersembunyi yang mendatangkan syak di mana-mana tempat dengan seorang perempuan yang bukan mahram selain daripada isterinya atas bersalah atas kesalahan khalwat dan boleh, apabila

⁸ Bintus Sami’ ar-Rakily, *40 Hadits Shahih Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, Pustaka Pesantren, h, 43-44

⁹ Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Qisthi Press, h, 435.

¹⁰ Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, h, 188.

¹¹ *Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan*, (Unit Penerbitan Negeri Kelantan, Kota Bharu, 1985) h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.”

Penelitian ini juga bertuju kepada Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu Tahun 2001 di dalam Seksyen 31 khalwat yaitu :

“seorang laki-laki yang di dapati berada bersama dengan seorang atau lebih dengan seorang perempuan yang bukan istri atau mahramnya di tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau kamar dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila dihukum boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama jangka waktu tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya.”

Dalam observasi awal, peneliti melihat adanya fenomena dan kasus-kasus perbuatan khalwat ini ialah apabila satu kasus berlaku kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah ditangkap oleh polisi agama karena bersalah melakukan hal seperti bercumbuan, berpelukan, berdua-duaan di tempat yang jauh dari orang ramai dan menimbulkan syak. Setelah ditangkap mereka yang bersalah akan menjalani prosedur pemeriksaan dan kemudian akan dibicarakan di mahkamah rendah syariah dan dijatuhkan sanksi hukum mengikut Enakmen Jenayah Syariah. Kasus-kasus di mahkamah syariah akan dijadikan penelitian, sejauhmana kasus-kasus ini dapat diselesaikan dengan muju kepada hukum-hukum yang berkenaan dengan khalwat¹².

¹² Md.Azwan Bin Md.Razali, *Hukuman Bagi Pelaku Yang Berkelakuan Tidak Sopan Menurut Hukum Islam*, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa contoh kasus-kasus yang dapat saya ambil di Mahkamah Negeri Kelantan.

1. Kasus pertama di Kelantan, pada tahun 2010, terdapat lima orang remaja termasuk tiga laki-laki dan dua perempuan ditahan dalam penangkapan sebuah acara parti tahun baru di hotel satu kamar di Jalan Hamzah dan masing-masing di denda RM. 900 dan RM. 1.000 oleh Mahkamah Rendah Syariah.
2. Kasus yang kedua, seorang laki-laki dan seorang wanita yang berstatus istri ditangkap di sebuah hotel sekitar jam 1.00 sore pada tanggal 25 Oktober 2010 dan masing-masing di denda sebanyak RM. 2.000 oleh Mahkamah Rendah Syariah Kelantan.
3. Kasus yang ketiga satu pasangan yang bukan suami istri maupun mahram berdua-duaan di pinggir sungai pada jam 11 pagi pada tarikh 6 November 2010 yang boleh menimbulkan syak dan telah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Masing-masing didenda sebanyak RM. 700 oleh Mahkamah Rendah Syariah Kelantan.

Beberapa kasus di Negeri Terengganu yaitu:

- a. Kasus pertama yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di tangkap di sebuah rumah di Kampung Gelugor sekitar jam 10.50 pagi, tanggal 11 Juni 2010 dan dijatuhkan hukuman sebanyak RM 2.600 oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.
- b. Kasus kedua melibatkan seorang laki-laki dan seorang wanita ditangkap khalwat dalam sebuah rumah di Bukit Tunggal, Kuala Nerus, sekitar jam 12.20 siang tanggal 11 Juli 2010. Sebagai denda, masing-masing didenda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak RM 2.450 bagi laki-laki dan RM. 500 bagi wanita oleh Mahkamah Syariah Terengganu. Setelah itu,

- c. Kasus ketiga, sepasang pasangan ditangkap di sebuah kamar pada jam 2 Dinihari bertarih 12 Mei 2010. Masing-masing di denda sebanyak RM 2.100 oleh Mahkamah Rendah Syariah Terengganu.

Dari fenomena ini, terlihat bahwa keputusan hakim berbeda di setiap kasus sementara ketetapan antara enakmen dengan keputusan hakim, berbeda. Maka, penulis tertarik untuk meneliti kenapa hakim memberi keputusan yang berbeda di setiap kasus yang dikendalikan.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dengan judul **“STUDI KOMPERATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI KELANTAN DAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI TERENGGANU MENGENAI KHALWAT.**

Batasan Masalah

Berdasarkan pada masalah yang diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan bagaimana hukuman khalwat menurut Enakmen Jenayah Syariah di Negeri Kelantan dan Negeri Terengganu, dan apakah faktor penyebab perbedaan putusan hakim.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim mahkamah rendah syariah negeri Kelantan dalam menetapkan hukuman khalwat?
2. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim mahkamah rendah syariah negeri Terengganu dalam menetapkan hukuman khalwat?
3. Apasaja faktor penyebab perbedaan putusan hakim?

D Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan dan pertimbangan hakim mahkamah rendah syariah negeri Kelantan dalam menetapkan hukuman khalwat
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan dan pertimbangan hakim mahkamah rendah syariah negeri Terengganu dalam menetapkan hukuman khalwat.
- c. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan putusan hakim.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan Dan Jenayah Syariah Negeri Terengganu berkaitan apa saja perbuatan khalwat adalah bersalah didalam Enakmen tersebut.
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Ilmu Hukum. di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis, selain itu, disini terdapat masalah dalam penelitian.

2. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Kelantan dan Negeri Terengganu. Sedangkan objek penelitian ini adalah menurut Enakmen Jenayah Syariah di Negeri Kelantan dan Negeri Terengganu, Bagaimana hukuman menurut Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Kelantan Dan Negeri Terengganu, dan apakah faktor penyebab perbedaan putusan hakim.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku khalwat mengikut data kasus yang terjadi setiap tahun di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan Mahkamah Negeri Terengganu pada tahun 2010. Secara keseluruhan adalah lebih dari sepuluh kasus Kelakuan khalwat di kedua negeri dan bagaimana penyelesaiannya. Sampel diambil sebanyak 5 kasus di Negeri Kelantan dan 5 kasus di Negeri Terengganu.

4. Sumber Data

- a. Data Primer : Yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dokumentasi : Yaitu data yang terdapat di perpustakaan atau buku-buku, artikel, majalah dan kamus sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Analisi Dokumen; yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan putusan Hakim bagi pelaku khalwat tentang keputusan Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Negeri Terengganu
- b. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada Hakim berkaitan dengan perbedaan putusan yang diberikan.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif komparatif.

7. Teknik Penulisan Data

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif; yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif; yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif; yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan berikut:

BAB PERTAMA yang merupakan bab pendahuluan diungkapkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB KEDUA dipaparkan tinjauan umum tentang penelitian yang terdiri dari profil enakmen kedua negeri yaitu latar belakang, visi, misi, dan isi enakmen secara umum.

BAB KETIGA disajikan uraian mengenai syari'at Islam tentang Kelakuan khalwat yang meliputi pengertian menurut bahasa dan istilah, Tinjauan umum tentang hukum khalwat, Pendapat Ulama' dahulu dan sekarang tentang Kelakuan khalwat dan dasar hukum menurut Al-Quran, Hadits dan pendapat ulama dan hikmah larangan khalwat.

BAB KEEMPAT disajikan data hasil penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah putusan dan pertimbangan hakim mahkamah rendah syariah negeri Kelantan dalam menetapkan hukuman khalwat.
2. Bagaimanakah putusan dan pertimbangan hakim mahkamah rendah syariah negeri Terengganu dalam menetapkan hukuman khalwat.
3. Apakah faktor penyebab terjadi perbedaan putusan hakim.

BAB KELIMA yang merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NEGERI PENYELIDIKAN

A. Negeri Kelantan

1. Latar Belakang

Kelantan Darul Naim¹³ atau nama pendeknya Kelantan merupakan sebuah negeri daripada 14 buah negeri di Malaysia yang kaya dengan sumber asli. Mempunyai keluasan lebih kurang 14,922 km persegi, terletak di timur laut Semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan, dan bersempadan dengan Thailand. Kelantan adalah sebuah negeri agraria (pertanian) yang mempunyai banyak kawasan tanaman padi dan perkampungan nelayan. Berdasarkan pada Bancian Tahun 2000, Kelantan mempunyai seramai 1,313,014 orang penduduk. Kaum Melayu merupakan kaum yang terbesar dengan 95%, diikuti dengan kaum Cina 3.8%, kaum India 0.3% dan lain-lain kaum 0.9%. berdasarkan bancian tersebut, 95% beragama Islam, diikuti dengan agama Buddha 4.4%, Kristian 0.2%, Hindu 0.2%, dan lain-lain agama 0.2%.

Kelantan Darul Naim terdiri dari 11 jajahan iaitu: Jajahan Kota Bharu, Jajahan Pasir Mas, Jajahan Pasir Puteh, Jajahan Bachok, Jajahan Kuala Krai, Jajahan Machang, Jajahan Tanah Merah, Jajahan Jeli, Jajahan Gua Musang dan Jajahan Kecil Lojing,

¹³ *Ensiklopedia Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1995). h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandar-bandar utama di negeri Kelantan termasuklah Kota Bharu (Ibu Negeri), Pasir Puteh, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Jeli, Rantau Panjang dan Pengkalan Chepa. Negeri Kelantan mengalami iklim tropika yang baik, dimana hampir setiap tahun hujan turun dengan berselang seli mengikut bulan tertentu. Biasanya, hujan yang lebat akan berterusan selama beberapa hari atau selama beberapa bulan. Bulan-bulan yang mengalami hujan yang paling kerap ialah bulan November, Disember, dan Januari, yaitu pada musim tengkujuh.

2. Sejarah Berdiri

Nama Kelantan dikatakan berasal daripada perkataan “gelam hutan” yang telah diubah suai, yaitu nama melayu bagi pokok *Melaleuca Leucadendron*. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya datang daripada perkataan “kilatan” atau “kolam tanah”¹⁴. Selain itu, Negeri Kelantan juga dikenali dengan nama Tanah Serendah Sekebun Bunga, Tanjung Pura, Negeri Cik Siti Wan Kembang dan Serambi Mekah pada masa dahulu. Selain itu juga, Kelantan juga berasal daripada ‘Kelatana’. Catatan Cina menyebut ‘Ho-lo-tan’¹⁵.

Sejarah awal Kelantan tidak begitu jelas, tetapi temuan arkeologi mempertunjukkan kesan petempatan manusia di zaman prasejarah¹⁶. Kelantan awal mempunyai perhubungan dengan Empayar Funan, Empayar Khmer,

¹⁴ Mohd Zain Bin Saleh, *Keluarga Di Raja Kelantan Darul Naim*, (Istana Negeri, Kubang Kerian, 1987), h. 10.

¹⁵ Sulaiman Zakaria, *Negeri-Negeri Melayu*, Kuala Lumpur Power Press & Design Sdn Bhd, h.18.

¹⁶ Abdul Razak Mahmud, *Ikhtisar Sejarah Kelantan*, (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan). h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Srivijaya dan Siam. Kira-kira 1411, Raja Kumar, Raja Kelantan, membebaskan negeri itu dari Siam. Beliau memakai gelaran Sultan Iskandar Shah apabila memeluk Islam. Kelantan kemudian menjadi sebuah pusat perdagangan yang penting pada akhir abad ke-15.

Pada 1499, Kelantan menjadi negeri asal Kesultanan Melaka. Dengan kejauhan Melaka pada 1511, Kelantan dibahagikan dan diperintah oleh ketua-ketua kecil. Dengan ancaman oleh Siam pada 1603, kebanyakan ketua kecil Kelantan bernaung di bawah Persekutuan Pattani Besar. Kerajaan pusat di Pattani membagikan Kelantan kepada 4 wilayah (kabupaten) yaitu Kelantan Timur, Kelantan Barat, Legeh dan Ulu Kelantan. Kira-kira 1760, seorang Putera Raja Kelantan Barat berjaya dalam penyatuan wilayah Kelantan sekarang. Tidak lama kemudian, pada 1764, Long Yunus yaitu putera raja Kelantan Timur, anak Long Sulaiman berjaya merampas takhta kerajaan dan mengisytiharkan diri sebagai Raja Kelantan. Walaubagaimanapun, dengan kemangkatannya, Kelantan dipengaruhi oleh Terengganu.

Pada 1800, Raja Muhammad mengisytiharkan diri sebagai sultan pertama Kelantan. Pada 1812, baginda melepaskan diri daripada pengaruh Terengganu dan menjadi negara Ufti Siam yang berasingan. Pada 1820, Kelantan merupakan salah satu daripada negeri yang terbanyak penduduk serta termakmur di Semenanjung Tanah Melayu karena berjaya mengelakkan perang dan pertikaian yang menimpa negeri-negeri di Selatan dan Barat. Siam terus memainkan peranan yang mustahak di Kelantan pada seluruh abad ke-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah syarat Perjanjian British-Siam pada 1909, Siam menyerahkan tuntutan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis kepada Britain, dan Kelantan menjadi salah satu daripada Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah Residen British.

Kelantan merupakan tempat pertama di Malaya yang ditakluk oleh Jepun yang menyerangnya pada 8 Disember 1941. semasa pendudukan Jepun, Kelantan sekali lagi di kawal oleh Siam, tetapi selepas kekalahan Jepun pada Ogos 1945, Kelantan kembali kepada pemerintahan British. Kelantan menjadi sebagian Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 dan bersama-sama negeri lain, mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. pada 16 September 1963, Kelantan menjadi salah satu daripada negeri-negeri yang membentuk Persekutuan Malaysia.

3. Tujuan

Pembangunan dan pentadbiran adalah nadi utama sesebuah kerajaan. Kecekapan membangun dan mentadbir sesebuah kerajaan akan memastikan kelangsungan kerajaan tersebut, begitulah sebaliknya. Menyedari bahwa membangun dan mentadbir sebuah kerajaan adalah satu amanah dari Allah SWT yang akan dipersoalkan kelak, maka kerajaan Negeri Kelantan telah mengambil satu pendekatan kearah mewujudkan pentadbiran yang lebih efisien dan bertanggungjawab terhadap rakyat samada didunia ini maupun di akhirat nanti.

Berdasarkan slogan Membangun Bersama Islam dengan tiga sendi utamanya Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan, kerajaan Negeri berusaha mentadbir dan membangunkan Negeri Kelantan Darul Naim, Negeri Serambi Mekah dengan tadahan wahyu dariNya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membangun Bersama Islam berarti, kepemimpinan yang menekankan tanggungjawab di dunia dan di akhirat dengan meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, dan Ulama' sebagai paksi kepemimpinan. Ianya menuntut pelaksanaan syariat Allah, menyampaikan dakwah, berusaha menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dasar ini bermatlamat untuk memastikan semua urusan pemerintahan dan pentadbiran negeri yang dirancang adalah selari dengan matlamat Membangun Bersama Islam berpandukan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Fungsi dan kecekapan sering kali dinilai mengenai sejauh mana kebijaksanaan dan keberkesanan dasar-dasar yang diwujudkan untuk kepentingan dan kehendak sakyat negeri kelantan. Tidak syak lagi, para pegawai dan semua kakitangan di negeri Kelantan ini berkewajiban untuk melaksanakan amanah kerajaan dengan penuh profesionalisme dan berintegriti demi menjayakan objektif yang telah ditetapkan.

4. Visi

Berkhidmat untuk Kerajaan Negeri Kelantan sebagai urusetia kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Dewan Undangan Negeri Kelantan dengan penuh tanggungjawab dan dinamik.

Misi

Menjadi sebuah organisasi kerajaan yang mantap, cekap, bermaklumat dan berintegriti berteraskan konsep Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan.

Struktur dan Organisasi

Sultan Negeri Kelantan merupakan Ketua Perlembagaan Negeri. Di bawah perlembagaan negeri, kuasa perundangan dikuasai oleh Dewan Undangan Negeri. Dewan ini melantik ahli untuk membentuk Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EXCO, yang diketuai oleh Menteri Besar, memegang kuasa eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri. Menteri Besar yang dilantik oleh Sultan adalah daripada parti politik yang memenangi kerusi yang terbanyak di dalam Dewan Undangan. Menteri Besar sekarang ialah Dato' Ahmad Bin Yaakob.

Dari sudut pendidikan, Kelantan amat menitikberatkan pendidikan agama. Suatu ketika dulu Kelantan pernah menjadi pusat tumpuan ulama dari serata tempat dan sehingga kini masih terkenal dengan nama jolokan negeri Serambi Mekah. Banyak rakyat dari luar Kelantan datang ke sini semata-mata untuk mendalami Ilmu Agama. Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika sekolah-sekolah agama atau lebih dikenali sebagai sekolah pondok muncul bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Sekolah Pondok Terusan yang terletak di Pasir Tumbuh Kota Bharu, merupakan antara sekolah pondok yang terkenal di Kelantan dan Tok Guru Kenali pula merupakan tokoh guru agama yang sudah tidak asing di Kelantan suau ketika dulu.

Di samping pendidikan agama, kerajaan Kelantan juga menitikberatkan pendidikan akademik. Di samping sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan, sekolah swasta juga banyak didirikan di Kelantan untuk memberi peluang kepada pelajar yang tercicir menyambung pelajaran mereka. Institusi Padang Merdeka [IPM], Sekolah Kadir Adabi, Institut Za'ba, dan Kolej Budaya merupakan sekolah swasta yang terkenal di Kelantan. Sekolah-sekolah ini turut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelajar di luar Kelantan. Sebagai sekolah yang mengutamakan kualiti sekolah-sekolah swasta ini juga mampu melahirkan pelajar yang cemerlang yang setanding dengan sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan.

B. Negeri Terengganu

1. Latar Belakang

Negeri Terengganu Darul Iman adalah salah sebuah negeri dalam Malaysia¹⁷. Terengganu terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Ia terletak di antara garisan bujur 102.25 dengan 103.50 dan garisan lintang 4 hingga 5.50 (lihat peta). di bahagian utara dan barat lautnya bersempadan dengan Kelantan manakala di bahagian selatan dan barat daya pula bersempadan dengan Pahang. Keluasan Negeri Terengganu ialah 12,955 km persegi (1,295,638.3 hektar).

Jaluran pantainya yang menganjur sejauh 225 kilometer dari Utara (Besut) ke selatan (Kemaman). sebelum tahun 1947 terdapat sembilan daerah di Terengganu : Kuala Terengganu, Kemaman, Kemasik, Paka, Dungun, Marang, Hulu Terengganu, Besut dan Setiu. Daerah dalam Negeri Terengganu dikurangkan kepada enam : Kuala Terengganu, Kemaman, Dungun, Marang, Hulu Terengganu dan Besut. Kemudiannya pada 1 Januari 1985, sebuah daerah baru yaitu Setiu telah dibentuk dan menjadikan daerah ketujuh di Negeri Terengganu. Tiap-tiap daerah ini ditadbirkan oleh Pegawai Daerah.

Terengganu terbahagi kepada 7 daerah yaitu Besut, Dungun, Kemaman, Kuala Terengganu, Marang, Setiu, dan Hulu Terengganu.. bandar-bandar utama di Terengganu adalah Bandaraya Kuala Terengganu (Ibu Negeri), Gong Badak Kuala Besut, Rantau Abang, Kuala Dungun dan Chukai.

¹⁷ Ensiklopedia Sejarah Dan Kebudayaan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, (Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1995).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Berdiri

Sejarah Terengganu yang awal adalah tidak jelas. Namun begitu terdapat catatan mengenai Terengganu oleh Saudagar Cina, Chao Ju Kua pada tahun 1225 yang menyebut sebagai jajahan takluk Palembang.

“Negarakartagama”, tulisan prapanca dari Jawa pada tahun 1365, menyatakan bahwa Terengganu, Paka dan Dungun di bawah taklukan Majapahit. Berdasar bukti arkeologi seperti kapak batu dan tembikar¹⁸ yang dijumpai di Gunung Bewah, terdapat manusia tinggal di situ sejak 400 SM. Pada batu Bersurat Terengganu terdapat pula catatan nama Raja Mandalika. Seterusnya dalam sejarah Terengganu, terdapat pemerintahan bernama Megat Panji Alam dan juga Tun Telanai.

Terengganu kemudiannya disebut sebagai negeri di bawah pemerintahan kerajaan Johor. Pada ketika itu, dua orang pembesar Johor, Laksamana dan Paduka Megat Seri Rama, dihantar memerintah Terengganu. Seterusnya, Bendahara Hasan pula dihantar mentadbir Terengganu. Berikutnya, Terengganu ditadbir oleh Tun Zain Indera, kemudiannya, oleh anak Tun Zain Indera, Tun Yuan, Tun Sulaiman dan Tun Ismail, Tun Sulaiman sebagai sultan di Pantai Layang (Balik Bukit), Tun Yuan sebagai Bendahara dan Tun Ismail sebagai Menteri Tersat.

Pengasas Kesultanan Terengganu sekarang ialah Sultan Zainal Abidin I¹⁹. Baginda yang juga dikenali dengan panggilan “Bendahara Padang Saujana”

¹⁸ Rashid Hamat, *Zaman Prasejarah Terengganu*, Perpustakaan Negara Malaysia, hlm, 128.

¹⁹ Sulaiman Zakaria, *Negeri-Negeri Melayu*, Power Press & Design Sdn Bhd, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah Putera Tun Habib Abdul Majid. Mengikut buku Tuhfat al-Nafis, karangan Raja Haji, Tun Zainal Abidin ditabalkan sebagai Sultan Terengganu oleh Daeng Menampuk atau Raja Tua diatas pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sumber yang lain pula dinyatakan Tun Zainal Abidin ditabalkan diatas takhta Kerajaan Negeri Terengganu oleh Phra Chau Yang, Raja Pattani.

Mengikut hikayat Johor serta Pahang, Tun Zainal Abidin datang ke Pattani setelah Paduka Raja Laksamana Wan Abdul Rahman dibunuh di Terengganu disekitar 1688. ketika berada di Pattani, Tun Zainal Abidin dijadikan anak angkat oleh Raja Pattani, Phra Nang Chau Yang.

Tun Zainal Abidin menjadi Sultan Terengganu pada tahun 1708. Ini berdasarkan duit kupang emas Terengganu yang mencatatkan nama Sultan Zainal Abidin dan tahun 1120 hijrah (bersamaan tahun 1708). Sultan Zainal Abidin I tidak lama bersemayam di Tanjung Baru, Kuala Berang, Berpindah ke Kota Batang Mahang, ke Langgar dan ke Pulau Manis. Kemudian berpindah lagi ke Chabang Tiga, Kuala Terengganu dan akhirnya di kawasan berhampiran Bukit Keledang (kini dipanggil Kota Lama), Istana Maziah.

Sultan Zainal Abidin I diganti oleh putera baginda, Ku Tana Mansur dengan gelaran Sultan Mansur I pada tahun 1733, ketika berusia 7 tahun. Baginda memerintah Terengganu sehingga tahun 1794. pada tahun 1739, Sultan Mansur Shah I berkahwin dengan Raja Bulang anak Daeg Chelak, Yamtuan Muda Johor Kedua. Berikutnya, baginda pula berkahwin dengan Raja Bakul, putera Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Ketika menduduki takhta kerajaan Terengganu, Sultan Mansur I telah menghabiskan empat belas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun (1746-1760) daripada masa pemerintahannya di Riau, terlibat dalam persaingan di antara orang Melayu dengan orang Bugis. Apabila pulang ke Terengganu pada 1760, baginda terlibat pula dalam politik Kelantan membantu Long Yunus, putera Long Sulaiman Ibni Long Bahar, Yang DiPertuan Kelantan menduduki takhta kerajaan Kelantan pada tahun 1776.

Sultan Mansur I digantikan oleh puteranya, Sultan Zainal Abidin II (1794-1808). Pada masa pemerintahan baginda, berlaku peperangan dengan Kelantan yang dipimpin oleh Long Muhammad Ibni Long Yunus, Raja Kelantan. Terengganu dikalahkan dan seterusnya Kelantan berjaya membebaskan diri daripada naungan Terengganu. Seterusnya takhta Kerajaan Terengganu diduduki oleh beberapa Sultan, Termasuk baginda Omar.

Tengku Seri Paduka Raja, Tengku Ismail diisytiharkan sebagai Sultan Terengganu pada Ahad, 16 Disember 1945. Baginda seterusnya ditabalkan pada tahun 1949 dengan gelaran “Sultan Ismail Nasaruddin Shah”. Sultan Ismail Nasaruddin dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong keenam dari 21 September 1965 hingga 20 September 1970. Dalam tempoh itu, Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahmud dilantik sebagai Pemangku Raja Terengganu. Apabila Sultan Ismail Nasaruddin Shah mangkat pada tahun 1979, takhta kerajaan Terengganu digantikan oleh Putera baginda, Duli Yang Teramat Mulia Yang DiPertuan Muda Tengku Mahmud. Baginda menduduki takhta kerajaan Terengganu dengan gelaran Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah. Sultan Mahmud mangkat pada 15 Mei 1998 di Singapura. Dengan itu, takhta kerajaan Terengganu digantikan oleh putera baginda, Sultan Mizan Zainal Abidin²⁰.

²⁰ Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah adalah merupakan Sultan Terengganu yang Ke-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan

Bagi memacu perkhidmatan awam Negeri Terengganu ini, satu Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia diwujudkan untuk melahirkan modal insan yang memiliki sikap, pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni yang cemerlang bagi melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan berkesan. Cabaran dalam pengurusan strategi dalam sumber manusia adalah untuk memastikan nilai-nilai teras, strategik teras, pelaksanaan strategik dan pelan tindakan untuk dilaksanakan bagi menyediakan anggota perkhidmatan Awam Negeri Terengganu yang unggul.

Dari pengurusan aspek sumber manusia, cabaran yang dikenalpasti adalah dalam bentuk cabaran dalaman dan luaran. Cabaran dalaman termasuklah cabaran untuk meningkatkan kompetensi, integriti, nilai-nilai murni, moral dan semangat kekitaan sumber manusianya bagi meningkatkan keberkesanan organisasi. Cabaran luaran pula adalah harapan stakeholders, kumpulan sasar dan komuniti yang kian meningkat disamping keperluan untuk mencapai tahap kecemerlangan di peringkat negeri dan nasional.

Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia ini juga mengutarakan enam strategi teras yaitu perancangan sumber manusia yang komprehensif dan dinamik, membangunkan kemahiran dan kompetensi pegawai-pegawai yang terbaik dan berpotensi tinggi melalui program pembangunan sumber manusia, termasuklah pembangunan kerjaya dan pembangunan kepimpinan, meningkatkan pengetahuan dan kreativiti sumber manusia, meningkatkan integriti dan menanam serta memperkukuhkan nilai-nilai murni dan disiplin di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan pegawai, mewujudkan budaya organisasi yang cemerlang dan mengekalkan tenaga kerja terbaik melalui program pengiktirafan dan penghargaan, meningkatkan moral dan semangat kerja berpasukan dengan mewujudkan persekitaran kerja yang selesa dan kondusif.

4. Visi

Untuk menjadikan perkhidmatan awam Negeri Terengganu yang terbaik di Malaysia melalui peyediaan sumber manusia yang kompeten, berilmu dan berprestasi tinggi, profesional dan beretika.

5. Misi

Menetapkan hala tuju yang strategik untuk memastikan dasar, strategi dan amalan pengurusan sumber manusia selaras dengan visi dan misi dan nilai pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.

Merancang dan menggubal dan melaksanakan pengurusan sumber manusia yang strategik dan komprehensif. Mewujudkan budaya cakra rakyat yang berprestasi tinggi di kalangan pentadbir ke arah menjadi pekerja yang cemerlang sekaligus dinobatkan sebagai pentadbir yang cemerlang.

Merancang dan membangunkan potensi dan prestasi modal insan melalui pengamalan konsep belajar sepanjang hayat "*lifelong learning*".

Membentuk budaya kerja berprestasi tinggi melalui penerapan nilai-nilai positif serta persekitaran kerja yang kondusif.

6. Struktur Dan Lokasi

Kuasa eksekutif negeri diketuai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan dilaksanakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selepas sesuatu Pilihanraya Umum, Duli Ynag Maha Mulia Sultan akan melantik salah seorang dari Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) yang telah memenangi Pilihanraya Umum sebagai Dato' Menteri Besar untuk mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

Kerajaan Negeri Terengganu mempunyai 10 orang anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu yang dipilih oleh Menteri Besar untuk membantu pentadbiran negeri. Setiap mereka mempunyai bidang tugas yang tertentu untuk melicinkan pentadbiran negeri.

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah bertanggungjawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri. Setiap Ahli MMKN mempengerusikan beberapa Jawatankuasa Tetap yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu. Melalui Jawatankuasa inilah Jabatan-Jabatan di negeri ini ditadbir. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengadakan mesyuarat secara tertutup seberapa kerap yang diperlukan bagi menentukan polisi dan program kerajaan.

Di Terengganu, usaha penjajah Inggris menerapkan hukum Inggris dan mengesampingkan hukum Islam yang telah dilaksanakan di negeri ini berawal sejak Inggris mendirikan joint court yang diketuai oleh british agent. Untuk membicarakan kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang Inggris atau warga negara Inggris saja. Ada juga hakim-hakim dari bangsa Melayu yang ditunjuk bertugas di mahkamah Joint Court ini. Pengadilan ini memiliki kewenangan membicarakan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesalahan jinayah (pidana) dan tuntutan sipil (perdata).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjajah Inggris juga telah membuat tanggapan bahwa hukum Islam yang ada dan berjalan di Terengganu pada saat itu sebagai “The Impractical Requirements of Muhammadan Law” dan sulit dilaksanakan. Penjajah Inggris berpendapat hukum Islam tersebut harus diganti dengan hukum Inggris.

Ketika negeri Terengganu di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah (1920-1942), atas saran Penasihat Inggris, beberapa perubahan struktur organisasi dan kewenangan Departemen Agama Islam Negeri telah dibuat serta perjalanan hukum telah diganti dengan hukum Inggris, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga orang-orang Islam.

Pada zaman penjajahan bagian kedua, posisi administrasi agama dan hukum Islam tidak banyak mengalami perubahan ketika zaman penjajahan Jepang (1942-1945). penjajah Inggris terus berkuasa di Tanah Melayu setelah selesainya perang dunia kedua. Tindakan Inggris yang paling efektif adalah mengubah struktur pemerintahan agama Islam dan hukum Islam yang dulunya ada, dengan mendirikan majlis (Dewan) Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, serta membuat hukum yang memiliki kewenangan yang terbatas untuk dilaksanakan di Mahkamah Qadi sesuai kehendak penjajah Inggris itu sendiri. Hukum Inggris dilakukan di pengadilan umum yang mana kewenangannya meliputi semua orang, baik Islam atau pun bukan Islam.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PENGERTIAN KHALWAT

Definisi Khalwat

Kamus Dewan²¹ mendefinisikan perkataan khalwat sebagai perihal perbuatan pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami istri sehingga dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang sumbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, khalwat bermaksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berdua-duaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil di antara laki-laki dan perempuan yang tidak berkawin.

Khalwat ialah bermaksud bergurau senda antara laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat yang sunyi. Sebagaimana yang kita tahu ia adalah diharamkan oleh agama. Ini karena dengan bergurau senda dan pandang memandang dapat membangkitkan nafsu berahi. Ia juga boleh mendorong kepada perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

²¹ Kamus Dewan Edisi 3, Dewan Bahasa Dan Pustaka, hlm 672.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW pernah bersabda **(Janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan wanita karena pihak ketiganya adalah syaitan)**

Hadis Riwayat Abu Daud.

Rasulullah telah mengingatkan bahwa terdapat godaan yang berat laki-laki dan perempuan “Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkahwin bersunyi-sunyian atau berdua-duaan ditempat yang tersembunyi dari pandangan orang ramai maka sudah pasti keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan syaitan”.

Khalwat adalah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita di belakang pandangan orang ataupun seorang laki-laki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya. Khalwat adalah perkara yang diharamkan dalam agama ini. Karena perbuatan khalwat mendekati kepada perbuatan zina. Zina adalah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Berdasarkan dalil dari Al-Quran yang mengharamkan perbuatan zina.

Sudah menjadi tabiat manusia di mana seorang laki-laki secara semula jadi cenderung kepada wanita. Contoh khalwat yang terjadi di sekeliling kita tanpa kita sedar yaitu mengambil orang gaji asing yang di bawa dari negeri-negeri yang jauh tanpa mahramnya. Kemungkinan besar tuan rumah atau seorang anak laki-laknya atau laki-laki dari keluarga tesebut sering berkhalwat dengan orang gaji itu di kala keluarga tiada di rumah. Selain daripada itu, satu jenis percampuran lagi yang sering kali terjadi yaitu mengambil khadam dari orang laki-laki dan pemandu-pemandu kereta dari laki-laki asing, dimana kita lihat mereka bepergian ke sana ke mari dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga mereka dan tinggal bersendirian dengan istri-istri mereka (Tuan rumah) tanpa mahram. Juga sebagian orang-orang Islam mula menghantar anak-anak perempuan mereka ke sekloah dengan pemandu tersebut atau mengirimkan salah seorang mahramnya ke pasar bersama dengan pemandu itu. Kemungkinan pemandu itu bukan beragama Islam atau menyimpang dalam agamanya, tingkah lakunya dan pakaiannya, bahkan jika pemandu itu orang yang bertaqwa sekalipun, maka tindakan tersebut haram hukumnya²².

Maksud Pergaulan

Pergaulan yang baik tidak wujud melainkan daripada orang yang memiliki akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh Islam karena orang yang ketandusan akhlak yang terpuji ini tidak akan memperlakukan orang lain dengan baik. Oleh yang demikian, pergaulan yang baik timbul daripada akhlak yang baik.

Dalam Kamus Bahasa Melayu pergaulan bermaksud “Perihal bergaul atau percampuran”. Dalam hubungan sesama manusia ianya mencakupi aktiviti-aktiviti social seperti perkenalan, berbaik-baik dan bersahabat.

Jika pergaulan laki-laki dengan perempuan ini merujuk kepada perlakuan sumbang atau menyalahi adab, penggunaannya akan dikaitkan dengan kata tambahan seperti pergaulan bebas, hubungan sulit, sumbang mahram dan sebagainya. Dalam Bahasa Arab pula perkataan pergaulan itu boleh disinonimkan dengan istilah “ikhtilat”.

Percampuran berkumpulnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram, atau laki-laki dan wanita bukan mahram berkumpul di satu tempat yang

²² Abdullah Bin Jarullah, *Hak & Kewajipan menurut Islam*, Putrajaya Al-Hidayah Publishers, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membolehkan mereka berhubung antara satu sama lain dengan pandangan atau isyarat atau percakapan.

2 Dasar Hukum Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits

Hadis yang menyatakan tentang keharaman khalwat yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan wanita tanpa mahram.

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan (hadits Riwayat Muttafaq’alaih)

Dan dari Uqbah Bin Amir Radhiyallahu’anh, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud

“Janganlah kamu masuk ke tempat wanita. Lalu seorang dari kaum Anshar berkata : ‘ Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tuan mengenai ipar?’ Beliau menjawab, “ipar itu maut (menyendiri dengannya bagaikan bertemu dengan kematian)” (Hadits Riwayat Muttafaqun’alaih)

Kedua hadits di atas secara jelas mengharamkan khalwat bagi seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Kebanyakan wanita zaman sekarang meremehkan hal-hal sebegini, di mana mereka seringkali membenarkan laki-laki yang bukan mahramnya menemuinya di rumah dan duduk bersama dengan alasan bahwa laki-laki itu sahabat keluarga. Dengan alasan dan pengakuan tersebut, mereka telah banyak merusak kehormatan dan menghancurkan rumah tangga.

Yang seharusnya dilakukan oleh wanita muslimah adalah tidak membenarkan masuk seseorang ke rumah suaminya kecuali atas izinnnya, dan dalam menemuinya mesti sentiasa memperhatikan aturan-aturan syari’at,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhijab dan tidak berkhawat. Oleh karena dia tidak duduk bersama-sama dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu meski sedang bersama suaminya hanya sekedar untuk berbincang-bincang hal-hal yang ringan. Duduk bersama hanya dibenarkan hanya pada saat mendesak menurut syari'at, misalnya berubat atau menikah.

Sebagian wanita ada yang duduk bersama laki-laki yang bukan mahramnya dengan alasan bahwa bersama-samanya ada anak-anak mereka yang masih kecil, sama ada laki-laki mahu pun wanita. Yang demikian ini sama sekali tidak benar karena keberadaan anak kecil dianggap tidak ada karena tidak menjadikan mereka tidak merasa malu. Demikian juga khalwat satu, dua atau lebih orang laki-laki dengan seorang wanita merupakan perbuatan yang diharamkan. Al-Thabrani mentakhrij satu hadits yang maknanya:

“Janganlah kamu berkhawat dengan wanita. Demi diriku yang ada dalam kekuasaanNya, tidaklah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita melainkan syaitan akan masuk di antara keduanya. Lebih baik seorang laki-laki berdekatan dengan babi yang berlumuran tanah liat atau lumpur daripada dia mendekatkan bahunya ke bahu wanita yang tidak halal baginya²³.”

Kadangkala seorang laki-laki menemui seorang wanita yang tertinggal dalam perjalanan bersama rombongan, maka dia (laki-laki) dibolehkan untuk menemaninya dengan syarat dia bejalan di depan wanita tersebut, seperti yang

²³ Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Ehsan, h, 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pada Aisyah r.a ketika tertinggal dari rombongan tentera pada saat terjadi hadisul ifki (berita bohong)

Agama Islam mengharamkan Khalwat ini sekalipun keatas tunangan sehinggalah mereka di akad (ijab dan kabul) dan dinikahkan. Maka lepas akad (ijab dan kabul), haruslah bagi pasangan laki-laki dan wanita ini untuk berdua-duaan tanpa menimbulkan fitnah lagi.

3 Pandangan Ulama Tentang Permasalahan Berkaitan Khalwat

Berkaitan dengan persoalan tunang ini, Yusuf Al-Qardhawi berkata: “Selagi akad kawin (ijab dan kabul) belum di tunaikan oleh tunang laki-laki dan tunang wanita (belum sah nikah atau kahwin mereka mengikut ‘uruf adat, syarak dan undang-undang), maka keadaan masih seperti hukum asal yaitu²⁴

- a. Tidak halal dan haram bagi makhtubah (tunang wanita) untuk berkhalwat (berdua-duaan sehingga menimbulkan fitnah) dengan khatibnya (tunang laki-laki) kecuali bersama-sama makhtubah (tunang wanita) itu ada salah seorang mahramnya seperti ayahnya atau abangnya.
- b. Tidak halal dan haram bagi makhtubah (tunang wanita) untuk bermusafir atau melancong dengan khatibnya (tunang laki-laki) kecuali bersama-sama makhtubah (tunang wanita) itu ada salah seorang mahramnya seperti ayahnya atau abangnya.

Kata Imam Nawawi pula, ketika mensyarahkan hadits tentang khalwat ini: Apabila bersendirian seorang laki-laki ajnabi dan seorang perempuan ajnabiah tanpa adanya orang ketiga bersama keduanya maka ia (berdua-duaan) adalah haram dengan kesepakatan para Ulama.

²⁴ Abu Mazaya al-Hafiz, *Fiqh Jenayah Islam*, Putrajaya Al-Hidayah Publications, h, 436.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kita ketahui hukum perbuatan ini, maka fahamlah kita bahwa ia termasuk dalam perbuatan maksiat. Manakala maksiat wajib di ubah dengan tangan, lisan, maupun jantung hati.

Adapun sifat larangan kepada perkara mungkar dan peringkat-peringkatnya, garis panduannya adalah ucapan Nabi (hadits). Maka ke atas seseorang untuk mengubah kemungkaran dengan setiap bentuk yang dia mampu. Tidak cukup sekedar memberi peringatan bagi sesiapa yang mampu mengubah dengan tangannya. Tidak boleh juga berpada dengan membenci dari hati bagi sesiapa yang mampu menghalang dengan lisan.

Setiap perbuatan yang menyalahi hukum atau undang-undang, semestinya akan ada hukuman yang sudah tertulis dalam Al-Quran maupun dalam undang-undang sesebuah negara. Di Malaysia, undang-undang yang berkaitan dengan khalwat dikenali sebagai hukuman ta'zir.

Ta'zir menurut bahasa ialah menolak, mencegah, atau menghalang. Ia dinamakan hukuman ta'zir disebabkan wujudnya hukuman tersebut akan dapat menghalang orang-orang yang melakukan kesalahan daripada melakukan kesalahan atau mengulangnya pada masa akan datang. Manakala menurut syara' ialah sejenis hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya atau bentuknya yang dilaksanakan bagi menunaikan hak Allah dan hak manusia terhadap kesalahan-kesalah yang selain hukuman qisas, hudud, diyat, dan kifar²⁵.

²⁵ Abd Latif & Rosmawati Ali, *Pengantar Fiqh*, Kuala Lumpur Pustaka Salam Sdn.Bhd, 1993:322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman yang berkaitan dengan ta'zir tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits, di mana ia terserah kepada budi bicara dan kepakaran hakim dan pemerintah untuk menetapkan sesuatu kesalahan itu dengan hukuman demi kepentingan penjenayah dan masyarakat serta negara.

Dalam hal tersebut juga, hukuman ta'zir itu berubah mengikut corak hidup masyarakat, individu dan keadaan. Selain itu, hukuman ta'zir juga tidak terhad, sama ada dengan denda, penjara, rampas harta atau buang negeri. Lantaran itu, ia meliputi ruang yang luas, seperti berkhawat, pecah amanah, rasuah, mengedar dadah, menagih dadah dan sebagainya.

Penetapan hukum ta'zir adalah termasuk dalam bidang kuasa hakim atau mahkamah, yaitu bagi tujuan untuk mengawal keadaan dan undang-undang supaya ia tidak disalahgunakan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaannya oleh sesiapa selain hakim. Antara tujuan pelaksanaan hukum ta'zir ialah:

- a. Untuk menjaga kepentingan masyarakat umum.
- b. Pelaksanaannya melalui pertimbangan yang wajar dan berkesan oleh hakim atau pemerintah untuk menolong orang yang bersalah juga masyarakat dan mengambil pelajaran dan menghindarkan perbuatan jahat dan untuk kesejahteraan manusia sejagat.
- c. Hukuman ta'zir janganlah melebihi hukuman hudud.
- d. Ta'zir mestilah dilakukan dengan adil jika pesalah terdiri daripada beberapa orang yang melakukan kesalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Penubuhan Enakmen Islam

1. Negeri Kelantan

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1980 dengan tujuan untuk membantu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam usaha mempergiatkan aktiviti-aktiviti dakwah dan pembangunan hal ehwal Islam di Negeri Kelantan.

Pada awal penubuhannya yaitu pada 1/12/1950, bidang tugas JAHEAIK yang dikenali dengan nama Pejabat Penyelia Agama atau lebih mashyur dengan panggilan Pejabat Pencegah Maksiat lebih tertumpu kepada bidang pencegahan, penangkapan dan pendakwaan jenayah syariah semata-mata. Pejabat ini wujud di bawah Pejabat Mufti Kerajaan Kelantan.

Sekitar Bulan Mac 1978 kerajaan telah mewujudkan Bahagian Agama Islam di Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan yang dikendalikan seorang pegawai yang berjawatan “Penolong Setiausaha (Hal Ehwa Agama)” serta beberapa kakitangan perkeranian. bermula pada Jun 1978, struktur pentadbirannya diperbesarkan dengan diberi taraf jabatan penuh yaitu diketuai oleh seorang pegawai berjawatan Pengarah, sementara Penolong Kanannya bergelar Setiausaha, tetapi masih di bawah sayap Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan. Hanya pada tahun 1980 barulah diwujudkan secara berasingan dari pejabat Setiausaha Kerajaan dengan peruntukan tahunan serta kuasa mengawal kewangan dan pentadbirannya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 60an seterusnya hingga kini, JAHEAIK telah mengalami perkembangan pesat dari segi bidang tugas serta struktur perjawatan dan pentadbirannya sesuai dengan tuntutan perubahan masa dan keadaan.

Asas kepada bidang kuasa pembangunan Hal Ehwal Islam di Malaysia telah diletakkan secara jelas di dalam system Perundangan Negara. Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Agama Islam adalah Agama bagi Persekutuan. Dalam pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Pengurusan Agama Islam diletakkan di bawah kuasa Kerajaan Negeri masing-masing. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahwa Yang DiPertuan Agung adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri berkenaan.

Bagi konteks Negeri Kelantan Pengurusan Agama Islam diletakkan di bawah kuasa KDYMM Al Sultan Kelantan sebagai ketua Agama Islam. Dalam melaksanakan pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Islam, JAHEAIK menggunakan akta-akta seperti berikut²⁶:

1. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Kelantan No.8/2002
2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan No.2/1985
3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No.6/2002
4. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No.3/1983
5. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No.9/2002
6. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bil 4/1994

²⁶ Mohamamad Yusoff Bin Hassan, *Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan*, Setiausaha Dewan Negeri Kelantan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Jemaah Menteri Di Kelantan

1. Latar Belakang

- a. Sistem Jemaah Menteri di Kelantan telah diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I (1801-1836)
- b. Sultan Muhammad II (1836-1886) membentuk Sistem Jemaah Menteri bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan.
- c. Sultan Muhammad II telah menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dengan pertikaian meebut kuasa dan menggantikannya dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan.

2. Struktur Sistem Jemaah Menteri Kelantan

- a. Jemaah Penasihat Raja – Menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia
- b. Jemaah Menteri Istana – Menguruskan Istiadat diraja dan Istiadat rasmi di seluruh Negeri Kelantan.
- c. Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman – Mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan Kehakiman.²⁷
- d. Jemaah Menteri Dalam Negeri – Menjaga Keamanan Negeri.
- e. Jemaah Menteri Luar – Menguruskan Dasar dan Hal Ehwal Luar Negeri.
- f. Jemaah Menteri Perbendaharaan – Mengendalikan harta benda dan hasil mahsul.

²⁷Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, Kota Bharu, hlm.,20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Jemaah Menteri Peperangan – Menguruskan pertahanan dan keamanan Negeri.
- h. Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarah Negeri – Menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri.

Pada tahun 1060 H bersamaan 1650 M, undang-undang Islam sejak zaman pemerintahan Sultan Muhammad masih berjalan seperti biasa, di mana pencuri-pencuri yang didapati bersalah di Mahkamah Syariah pada masa itu dikenakan hukuman hudud. Keadaan ini berjalan terus dengan baik sehinggalah pada suatu masa di mana adanya campur tangan penjajah yang telah memperkenalkan undang-undang mereka ke dalam sistem perundangan yang berkuatkuasa pada masa itu serta mengeneipkan undang-undang Islam sedikit demi sedikit melalui Enakmen-Enakmen yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang Mahkamah Syariah sehinggalah tinggal undang-undang yang berkaitan dengan Keluarga Islam sahaja. Di antara Enakmen-Enakmen itu ialah:

1. Enakmen Tahun 1909 yang dikenali dengan peraturan berkuatkuasa No.5/1909.
2. Enakmen Tahun 1910 yang membataskan bidangkuasa Mahkamah Syariah yang ada di Kelantan pada masa itu.
3. Enakmen Tahun 1916 berhubung dengan nikah cerai No.19/1916.
4. Enakmen Tahun 1938 berhubung dengan kesalahan melanggar agama Muhammadiyah No.21/1938 bersabit dengan nikah cerai no.31/1938 berhubung dengan nafkah.
5. Pada tahun 1953 Enakmen berhubung dengan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan Qadhi No.1/1953.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa itu, Mahkamah-Mahkamah Syariah adalah di bawah Pejabat Mufti. Tetapi Mahkamah Rayuan masih lagi di bawah Pejabat Mufti dan dipengerusikan oleh Mufti sendiri. Mulai 1 Julai 1998, Kerajaan Negeri telah menubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan bagi menggantikan Mahkamah Qadhi. Susunan Mahkamah adalah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah Rayuan Syariah bertempat di Kota Bharu dan dipengerusikan oleh Ketua Hakim dan tidak lagi dipengerusikan oleh Mufti seperti mana sebelumnya.
2. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi.
3. Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Tujuan penyusunan semula struktur Mahkamah-Mahkamah Syariah ialah untuk memberi sepenuh penumpuan dan perhatian di dalam bidang Kehakiman Syariah serta pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan Mahkamah. Undang-Undang yang berjalan sekarang di Mahkamah Syariah ialah:

1. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah No.3/1992.
2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah No.2/1985.
3. Enakmen Keluarga Islam No.6/2002.
4. Enakmen Ttatacara Mahkamah Syariah No.8/2002.
5. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah No.8/2002.
6. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah No.9/2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No.4 Tahun 1994 berhubung dengan kesalahan-kesalahan.
8. Kaedah Hukum Sebat 1987.
9. Kaedah Peguam Syarie 2000.

Pada tanggal 3 Juli 1996, Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan penyusunan semula Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia melalui Kaidah-Kaidah berikut:

1. Ditubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia oleh Kerajaan Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Syarie Malaysia juga Ketua Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah.
2. Wujudkan struktur organisasi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
3. Wujudkan 4 jawatan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah bsgi menimbang semula kes rayuan Mahkamah Rayuan Negeri-Negeri dan Wilayah-Wilayah.
4. Mengekalkan struktur Mahkamah Syariah Negeri-negeri dan Wilyah-wilayah termasuk pentauliahan Ketua Hakim Syarie serta Pegawai-pegawai Syariah.
5. Kerajaan Persekutuan akan membiayai kos Pegawai Syariah.

Negeri Terengganu

a. Latar Belakang

Berdasarkan catatan yang ditemui, MAIDAM pada asalnya dinamakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditubuhkan pada tahun 1949 apabila Undang-Undang Bil.1 Tahun 1949 diwartakan pada 16 Februari tahun yang sama.

Menurut warta tersebut, bahwa Yang Maha Mulia Sultan akan menyebabkan supaya dibuat Undang-undang bagi maksud mengatur segala perkara-perkara agama dan bagi mendirikan satu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu karena membantu dan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia di dalam semua perkara yang bersangkutan dengan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu.

Undang-undang tersebut dinamakan Undang-Undang Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu 1949. Keahliannya terdiri tidak kurang daripada 3 orang ahli rasmi yang memegang jawatan yang bergaji di bawah Kerajaan Negeri dan tidak kurang daripada 5 orang ahli yang bukan rasmi.

Bagaimanapun, sepanjang Undang-Undang tersebut ditubuhkan, senarai keahlian Majlis tidak ditemui sehinggalah Undang-Undang tersebut dipinda 6 tahun kemudian yaitu dengan termaktubnya Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak Tahun 1955. Undang-Undang ini turut menghapuskan perkataan Istiadat dan diletakkan di bahagian III di bawah fasa 6 hingga 21 dengan menampakkan peranan dan fungsi yang lebih jelas dan terarah.

Mulai dari itu (1 Julai 1958), telah ditemui senarai keahliannya uang diwartakan dari semasa ke semasa hingga sekarang. Pada peringkat itu, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu akan dilantik menjadi Yang di Pertu Majlis. Perkara ini berlaku sehinggalah Kerajaan sekali lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawartakan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 pada 26 Mac 1987. Dalam enakmen ini seorang Setiausaha dilantik bagi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT).

Pada tahun 1992, pindaan enakmen dibuat bagi menukar lantikan Setiausaha bagi JHEAT kepada lantikan Setiausaha bagi Majlis. Tanggal 10 April 1996, diluluskan pindaan enakmen bagi membolehkan YAB Menteri Besar menjadi Yang DiPertua Majlis dan secara automatik Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama sebagai Setiausaha Majlis.

Pada 30 Juni 1998, pindaan sekali lagi dibuat melibatkan lantikan Setiausaha Majlis yang juga bertindak sebagai Ketua Pegawai Eksekutif yang akan menjalankan segala dasar dan ketetapan Majlis. Semua perkataan Jabatan dan Pesuruhjaya dalam enakmen ditukar kepada Majlis.

Seterusnya pada 22 November 2001, kerajaan telah meluluskan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 2001 yang berkuatkuasa pada 1 Agustus 2002. Pindaan-pindaan telah dibuat pada tahun 2003 dan 2008 yang melibatkan pelantikan Yang DiPertua Majlis bukan Menteri Besar dan keanggotaan Majlis yang lain. Pindaan terbaru terhadap Enakmen ini ialah pada tahun 2012. Kerajaan Negeri, melalui Dewan Undangan Negeri yang bersidang pada 25 April 2012, telah meluluskan pindaan Enakmen ini yang mengandungi dua puluh seksyen.

Jawatan Pesuruhjaya masih dikekalkan dan kuasa perlantikan jawatan ini kekal di tangan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama juga akan menjadi Setiausaha dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan Konstitusi Federal yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri mengenai keanggotaan, susunan dan pengaturan Mahkamah Syariah, maka Kantor Mahkamah Syariah Terengganu harus didirikan secara terpisah dari Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu. Akibat dari itu, melalui Kebenaran Personalial Negeri Terengganu Bilangan 2/1988, JKSTR diasingkan dari JHEAT berlaku mulai 1 Januari 1988.

Sebelum tahun 1988, Mahkamah Syariah di Terengganu adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan di dalam Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu. Mahkamah Syariah di Terengganu ini muali 1 Agustus 1987 telah disusun dalam tiga tingkat yaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah .

Mulai 1 Januari 1988, Kantor Kehakiman Syariah Terengganu didirikan dan serentak dengan itu Mahkamah Syariah keseluruhan ditempatkan di bawah departemen baru ini dan terus bersaing dari Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu²⁸. Sebagai langkah jaga panjang, dalam bulan September 1990, Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu telah mengajukan proposal agar sebuah bangunan khusus dibangun untuk penempatan Mahkamah Syariah di Kuala Terengganu untuk membangun sebuah bangunan.

Pada 4 Desember 1994, Dewan Rapat Negeri di dalam pertemuannya telah membuat perimbangan pada usulan pembangunan bangunan baru Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Akhirnya pada 2 Mei 2000, Kantor

²⁸ Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, (Terengganu : Kuala Terengganu, 2004), cet. Ke-2, jilid 57, h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehakiman Syariah telah beroperasi di bangunannya yang baru yang dinamakan Bangunan Mahkamah Syariah Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu. Bangunan ini diresmikan oleh Duli Yang Maha Mulia *al-Wathiqu Billah al-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni al-Marhum al-Sultn Mahmud al-Muktafi Billah Shah*.

Berdasarkan ketentuan di dalam Eankmen Pentadbiran (Administrsi) Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1986, (Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986), Mahkamah Syariah di dalam negeri ini dibuat dalam tiga tahap, dan pada saat ini dipecah menjadi posisi seperti berikut²⁹:

1. Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu
2. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (di Daerah Kuala Terengganu sahaja ada dua Daerah)
3. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu (tiga dewan bicara)
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu

Setiap pengadilan yang tersebut itu dijadikan salah satu kegiatan atau bagian dalam Kantor Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR), disamping aktivitas Jasa Manajemen, Keuangan dan Sumber Daya Manusia,

²⁹ Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004), set. Ke-3, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta Unit *Sulh*. Oleh yang demikian JKSTR dipecah menjadi kegiatan atau bagian seperti berikut:

1. Bagian layanan Manajemen dan Sumber Daya Manusia
2. Mahkamah Rayuan Syariah
3. Mahkamah Tinggi Syariah
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang
10. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu
11. Unit *Sulh*

Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986 itu kemudiannya digantikan dengan Enakmen Syariah (Terengganu) 2001, berlaku mulai 1 Agustus 2002.

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

1. Latar Belakang
 - a. Pada 1911, Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu.
 - b. Dikenali juga sebagai Ittiqan-II muluk bi-tadil il-suluk bermaksud keyakinan kepada pemerintahan yang berdasarkan keadilan.
 - c. Tujuan- untuk menghalang British yang sedang berusaha meluaskan kuasanya di Terengganu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu³⁰
 - a. Pemerintahan beraja bercorak raja berpelembagaan.
 - b. Pemerintahan Terengganu mesti beragama Islam.
 - c. Berbangsa Melayu.
 - d. Laki-laki.
 - e. Merupakan waris Sulan yang memerintah Terengganu.
3. Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri.
4. Menteri yang menganggotai Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama Islam, berbangsa Melayu, rakyat Terengganu serta mengaku taat setia kepada Sultan dan kerajaan.
5. Majlis Mesyuarat kerajaan diketuai oleh Menteri Besar yang dilantik oleh Sultan.
6. Jemaah menteri berhak memilih Naib Menteri Besar yang dilantik oleh Sutan.
7. Ahli mesyuarat kerajaan bertanggungjawab membantu Sultan dan Jemaah Menteri untuk mentadbir Negeri, Menggubal Undang-Undang dan peraturan negeri, menjaga kebajikan rakyat, menjaga keamanan negeri dna menjalinkan hubungan dengan negeri lain.
8. Waris sultan atau menteri dilarang mengkhianati pemerintah negeri dan ditegah menyerakkan negeri kepada kuasa lain.

³⁰ Bagian pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu*, (Terengganu, Mahkamah Syariah, 1998).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Huraian dan penjelasan yang dibuat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan terhadap penelitian ini.

1. Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan menetapkan hukum bagi pelaku khalwat dengan ketetapan, laki-laki dan perempuan jika disabitkan dengan kesalahan khalwat, dikenakan hukuman denda tidak melebihi dua ribu ringgit (Rp 6,000,000) atau penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.
2. Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu menetapkan hukum bagi pelaku khalwat dengan ketetapan laki-laki dan perempuan jika disabitkan dengan kesalahan khalwat, dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit (Rp 10,000,000) atau dipenjarakan tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
3. Terjadi perbezaan hukuman bagi pelaku khalwat di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dengan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu dikarenakan putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan menjadikan keadaan ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum bagi pelaku khalwat manakala bagi Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu pula, pertimbangan yang dibuat berdasarkan peningkatan kasus khalwat dikarenakan di Negeri Terengganu terdapat banyak tempat-tempat wisata yang menyebabkan tempat tersebut menjadi pusat tumpuan bagi anak-anak muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada seluruh pemuda pemudi Islam agar senantiasa meningkatkan keimanan, agar terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar.
2. Kepada orang tua agar senantiasa menjaga pergaulan anak-anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, salah satunya yaitu khalwat,
3. Kepada seluruh Mahkamah di seluruh Negeri di Malaysia agar lebihh ditingkatkan lagi razia lapangan untuk kasus seperti khalwat, dengan melaksanakan jadual tiga kali dalam sepekan karena perbuatan khalwat ini biasanya berujung pada penzinaan yang nantinya merusak generasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali, Pengantar Fiqh, (Kuala Lumpur Pustaka Salam Sdn Bhd, 1997).
- Abdul Razak Mahmud, Ikhtisar Sejarah Kelantan (Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2002)
- Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al-Jarullah, Hak Dan Kewajiban Wanita Menurut islam, (Kuala Lumpur Al-Hidayah Publishers, 2000)
- Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, Fikih Sunnah Wanita
- Abu Mazaya Al-Hafiz, Fiqh Jenayah Islam, (Putrajaya Al-Hidayah Publications, 2004).
- Akhmad Azhar Abu Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja (Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta 2001).
- Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998).
- Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, (Kuala Terengganu: Mahkamah Syariah, 1998).
- Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta : 2012).
- Bentus Sami' ar-Rakily, 40 Hadits Shahih Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual (Pustaka Pesantren: Yogyakarta 2011).
- Che Mohamad Khairi Bin Che Ghaffar, Pelaksanaan Sanksi Talak Tanpa Izin Di Luar Mahkamah (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu)Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan, (Unit Penerbitan Negeri Kelantan, Kota Bharu,1985)
- Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu,(Kuala Lumpur, 1995)
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Besut, Kes No. 11001-143-0002-2019.
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Besut, Kes No. 11001-143-0072-2018.
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Besut, Kes No. 11001-143-0076-2017.
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Besut, Kes No. 11001-143-0086-2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes No. 143-0010-2018.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes No. 143-0108-2019.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes No. 143-0144-2016.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes No. 143-0151-2016.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes No. 143-0158-2016.

Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kes No. 143-0160-2016.

Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu: Percetakan Nasional Berhad, Kuala Terengganu, 2004).

Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan Tahun 1982.

Government of Terengganu, Warta Kerajaan Negeri Terengganu, (Terengganu : Kuala Terengganu, 2004).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam (Pustaka Pelajar Offset : 2007).

Md.Azwan Bin Md.Razali, Hukuman Bagi Pelaku Yang Berkelakuan Tidak Sopan Menurut Hukum Islam.

Mohd Zain, Keluarga Di Raja Kelantan Darul Naim (Istana Negeri Kubang Kerian 1987)

Muhammad Athiyah Khumais, Fiqh Wanita, (Selangor Pustaka Al-Ehsan, 2014).

Muhammad Hussain, Darjat Wanita Dalam Islam, (Selangor Pustaka Ilmi 2006)

Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta 2010).

Nurul Amira Binti Mohd Nasir, Hukuman Bagi Penzina Dalam Enakmen Kanun Jinayah Tahun 1985 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah, Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Kelantan

Rian Norzilawati, Penolong Pegawai Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Besut, Wawancara,(Terengganu, 2019).

Rashid Hamat, Zaman Prasejarah Terengganu, (Perpustakaan Negara Malaysia 2019).

Sulaiman Zakaria, Negeri-Negeri Melayu (Kuala Lumpur, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuan Haji Mat Ropi, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Besut, Wawancara, (Terengganu, 2019).

Tuan Mohd Hafiz, Ketua Panitera Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Wawancara (Kelantan, Wawancara 2019).

Tuan Samsudin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan, Wawancara (Kota Bharu, 2019).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Wa Adillatuhu, (Gema Insani, 2011)

Naz Hamzah, Kamus Dewan Edisi 3, Dewan Bahasa Dan Pustaka (Gema Publisher Kuala Lumpur, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah **Alia Syakirah Binti Mat**. Dilahirkan di Hospital Tanah Merah, Kelantan Darul Naim, Malaysia pada tanggal 01 September 1995. Yang dilahirkan sebagai anak pertama daripada 2 bersaudara dan menetap di Kampung Jerimbong, Kuala Balah, Kelantan.

Memulakan persekolahan di tingkat rendah di Sekolah Kebangsaan Bukit Jering selama 6 tahun, kemudian di tingkat menengah di Maahad Raudhah An-Nazirin selama 5 tahun.

Kemudian penulis melanjutkan pelajaran di Maahad As-Sobirin selama 2 tahun. Seterusnya penulis melanjutkan pengajian ke tingkat yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia (UIN SUSKA, Riau) dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum pada tahun 2015.